

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK KINERJA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH:

**MEYDITA PRATAMA SYAHFITRI
NPM. 210411044**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ELEKTRONIK KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 13 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



MEYDITA PRATAMA SYAHFITRI
NPM. 210411044

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI ELEKTRONIK KINERJA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : MEYDITA PRATAMA SYAHFITRI

NPM : 210411044

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : April
Tahun : 2025

TIM PENGUJI

Ketua



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

Sekretaris

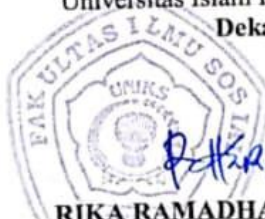


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. **RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si** (Anggota 1)
2. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si** (Anggota 2)
3. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota 3)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ELEKTRONIK KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

MEYDITA PRATAMA SYAHFITRI

NPM: 210411044

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum penggunaan aplikasi E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai instansi yang berpusat mengelola aplikasi tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci: Implementasi, E-Kinerja

ABSTRACT

PERFORMANCE ELECTRONICS IMPLEMENTASION ON EDUCATION AND TRAINING PERSONNEL AGENCY OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

MEYDITA PRATAMA SYAHFITRI

NPM: 210411044

The research was carried out at the office of the education and training authorities of the district of Kuantan Singingi. The aim of this research is to find out whether the application of E-Permormance has been properly implemend or has not been used in the education and training agencies of the District of Kabupaten Kuantan Singingi, as the central authority that manages the application. The analysis used in this research was a qualitative method that were the data collected was analyzed by describing and linking theories according to existing problems, then interpreted on the relevant result and conclusions drawn and given advice. While the population in this study were all employess of the Regional Revenue Service plus several taxpayers with the sampling technique used random sampling. While the data collection techniques in this study were observation, interview and documentation.

Keywords: Implementation, E-Performance

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara	8
2.1.2. Teori Kebijakan.....	12
2.1.3. Teori Implementasi	17
2.1.4. Teori Pemerintahan Daerah.....	21
2.1.5. Teori Teknologi Informasi	23
2.1.6. Teori E-Kinerja	27
2.2. Kerangka Pemikiran.....	30
2.3. Hipotesis.....	30
2.4. Definisi Operasional.....	31
2.4.1. Standar dan Sasaran Kebijakan	31
2.4.2. Sumber Daya	31
2.4.3. Hubungan Antar Organisasi	31
2.4.4. Karakteristik Agen Pelaksana	31
2.4.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....	32
2.4.6. Disposisi Implementor	32
2.5. Operasional Variabel.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Informan	34
3.3. Sumber Data	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	35
3.4. Fokus Penelitian	35
3.5. Lokasi Penelitian	36
3.6. Metode Pengumpulan Data	36
3.6.1. Pengamatan (Observasi).....	36
3.6.2. Wawancara	36
3.6.3. Dokumentasi.....	37
3.7. Metode Analisis Data	37
3.7.1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	37
3.7.2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	38
3.7.3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	38
3.7.4. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verifikasi</i>).....	38
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	39

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	40
6.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA	41
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital yang cepat mengakibatkan berbagai aspek kehidupan juga mengalami perubahan yang signifikan yang mengharuskan untuk melakukan perubahan. Pada era digital ini, manusia harus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia dimasa mendatang dan juga menciptakan terobosan baru atau penemuan baru seiring berjalannya waktu untuk penggunaan global dalam memudahkan pekerjaan manusia.

Pemanfaatan digitalisasi ini sangat berguna untuk berbagai sektor, salah satunya pada sektor pemerintahan. Dapat dijelaskan bahwa sektor pemerintahan adalah suatu kumpulan organisasi ataupun lembaga yang tugasnya mengurus dan menjalankan sistem kenegaraan guna mencapai tujuan bersama. Sektor pemerintah melingkupi seluruh unit kelembagaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian sampai pemerintah daerah, bahkan termasuk didalamnya ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia).

Digitalisasi sangat berguna pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat namun penggunaan digitalisasi juga bisa diterapkan di pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah bertugas untuk menyelenggarakan tata kelola yang ada dikawasan daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengelola urusan daerah tersebut. Sedangkan pemerintah pusat mengurus dan mengelola

urusan negara termasuk mengelola daerah sekalipun. Meskipun pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan begitu saja akan pengelolaan daerah. Akan tetapi pemerintah pusat tetap mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Peranan digitalisasi terhadap tata kelola pemerintahan tidak hanya berperan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan saja, tetapi juga bisa meningkatkan kedisiplinan. Sebab kedisiplinan mempengaruhi kualitas kinerja suatu organisasi. Tentunya hal ini berpengaruh juga terhadap pemerintah daerah.

Maka dari itu pemerintah berupaya mengelola tata pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti membuat kebijakan berupa E-Kinerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi bagi urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan dan mengelola urusan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi Riau menyorot kinerja dan disiplin Aparatur Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal itu menjadi salah satu masukan dari DPRD Kuansing terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (KLPj) Bupati Kuansing 2020. DPRD Kuansing menilai, tingkat kinerja dan disiplin ASN sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar melakukan pembinaan dan

membuat terobosan berupa program kegiatan penunjang yang dapat meningkatkan kinerja dan disiplin. ASN yang tidak disiplin jelas melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kauansing menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN di Kuansing. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat sebuah terobosan untuk peningkatan kinerja dan disiplin ASN, yakni sebuah aplikasi bernama E-Kinerja. Aplikasi ini pertama kali diterapkan pada tahun 2021. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pemerintah untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi. E-Kinerja sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan inovasi E-Governance (tata kelola pemerintahan) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 berupa penerapan aplikasi E-Kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai. Tujuan E-Kinerja adalah tersedianya data kinerja pegawai ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tabel I.1 Manfaat Aplikasi E-Kinerja

No	Manfaat	Keterangan
1	Sebagai alat untuk mengontrol kehadiran pegawai	E-Kinerja Merupakan strategi baru untuk para pemimpin lembaga mengetahui kehadiran setiap pegawainya. Aplikasi ini juga dibentuk dan disesuaikan dengan kemampuan penggunaanya sehingga mudah untuk digunakan
2	Meningkatkan kinerja pegawai	Dengan data yang telah terstruktur secara baik maka pegawai akan dapat melihat hasil tunjangan kinerja mereka berdasarkan persentase penilaian didalam aplikasi. Tentu adanya aplikasi ini membuat pegawai mau tidak mau secara meningkatkan kinerja mereka.
3	Memudahkan manajemen birokrasi	Selain sifatnya yang interaktif, setiap informasi yang masuk kedalam aplikasi ini

		mudahkan para SKPD dalam penginputan data. Berbagai macam fitur E-Kinerja dapat didata secara otomatis sehingga SKPD tak perlu melakukan rekap bulanan data pegawai beserta tunjangannya.
4	Sebagai indikator pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Dengan adanya aplikasi ini tidak ada alasan bagi pegawai untuk bermalas-malasan lagi. Pengaplikasian sistem yang ketat membuat upah pegawai akan diberikan sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Sumber: Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 65 Tahun 2019

Dapat dijelaskan bahwa aplikasi E-Kinerja ini sangat berguna untuk absensi secara digital, tidak seperti yang sebelumnya. Yang dimana absen dilakukan secara manual, para pegawai setiap hari kerja datang ke kantor sebelum memulainya jam kerja untuk mengisi buku absen. Tidak hanya itu, aplikasi E-Kinerja juga berfungsi sebagai aplikasi yang berperan untuk melaporkan hasil kerja. Jadi suatu pekerjaan yang dikerjakan akan dilaporkan melalui E-Kinerja tersebut. Sehingga hasil kerja para pegawai akan terdata didalam aplikasi tersebut. Dengan data yang telah terstruktur secara baik maka pegawai akan dapat melihat hasil tunjangan kinerja mereka berdasarkan persentase penilaian didalam aplikasi. Tentu adanya aplikasi ini membuat pegawai mau tidak mau secara meningkatkan kinerja mereka.

Tabel I.2 Persentase Pengurangan TPP ASN yang tidak Hadir dalam Pelaksanaan Tugas Tanpa Alasan yang Sah

No	Keterangan	Potongan TPP
1.	ASN/CPNS yang tidak mengikuti apel/ upacara/ olahraga/ kegiatan keagamaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan	0,5%
2.	ASN/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada pagi hari masuk kantor dan pulang kantor sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1%
3.	ASN/CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan	0,5%

Sumber: Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel I.3 Persentase pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja

No	Keterangan	Potongan TPP	Waktu
1.	Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan	5%	1 bulan
2.	Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran tertulis	10%	1 bulan
3.	Pegawai yang di jatuhi dengan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis	15%	1 bulan
4.	Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala	10%	2 bulan
5.	Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	15%	2 bulan

Sumber: Pasal 24 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari keterangan di atas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa persentase penilaian sanksi E-Kinerja terhadap peningkatan kinerja pegawai sangatlah kecil. Ini menunjukkan tidak tegasnya pemerintah dalam

menetapkan sanksi E-Kinerja, hal ini juga dipengaruhi oleh beban kerja yang diterima kepada pegawai. Pada dasarnya E-Kinerja sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “Implementasi E-Kinerja pada Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah penerapan E-Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa penerapan E-Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai badan yang memegang kendali atas E-Kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sehingga dapat berdayaguna dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.4.2.2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan kajian lebih mendalam di Bidang Kepegawaian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitive. Ia akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Manusia menyadari akan nilai kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektif lah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri.

Kerjasama menurut adanya pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat ada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau

menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat, dan kapasitas individu.

Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperative diadakannya pembagian kerja dan secara substantial telah meredusir pentingnya kemampuan individual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar anggota ini didasarkan atas perbedaan kemampuannya yang disebabkan oleh factor keturunan dan factor lingkungan. Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan mengarah kepada spesialisasi keahlian.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan pelanggan, pemecahan masalah secara cepat dan lainlain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif.

Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat

dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. (Ekowanti dan Tamrin, 2022: 7-8).

Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist...all those operations having for the purpose the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan).

Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan

undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021: 22).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas – tugasnya tersebut.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya, 2016: 1).

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015 : 3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Menurut Atmosudirjo (dalam ngusmanto, 2015: 15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suminta (dalam Pasolong, 2016:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

2.1.2. Teori Kebijakan

Kebijakan Publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikta publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilalukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. (Engkus, 2022).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para actor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana, 2018).

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nugroho R. (Uddin, 2017: 8).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah

atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara”. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Nugroho (Uddin, 2017: 9).

Menurut Said Zainal Abidin, alumni *University of Pittsburgh*, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Said Zainal Abidin (Uddin, 2017: 10).

Menurut Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017: 10) Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut di evaluasi.

Akan tetapi, dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin 2017: 10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- (1) Efektifitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasikan tujuan akhir yang diinginkan.
- (2) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- (3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencari hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- (4) Adil
- (5) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang dikutip dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017: 34-35) diantaranya:

- (1) Irfan Islamy

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

(2) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan.

(3) George C. Edwards III & Ira Sharkansky

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

(4) W.I. Jenkins

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

(5) James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

(6) Chief J.O. Udoji

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2.1.3. Teori Implementasi

Pengertian mengenai implementasi kebijakan publik sangat beragam. Anderson mengemukakan bahwa: *"Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems"* (Pelaksanaan kebijakan adalah aplikasi oleh mesin/badan administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah) . Kemudian Edward III menjelaskan bahwa: *"Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* (pelaksanaan kebijakan adalah tahap pembuatan antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang terpengaruh atas kebijaksanaan tersebut). Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan publik. Dalam tahapan ini, apa-apa yang sudah dituliskan dalam formulasi akan diterapkan pada masyarakat luas. Tujuan dilaksanakan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijiwijoto "implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". (Maranda, 2020:1).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari

keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- (3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi

implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014:71-72) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) Para Pelaksana

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kelebihan dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu memberikan skor yang tinggi pada kesederhanaan dan keterpaduan serta memaksimalkan perilaku berdasarkan pemikiran tentang sebab akibat dan pertanggung jawaban bersifat *single* atau penuh. Kekurangannya terletak pada bukti penting atau *realism* dan kemampuan pelaksana, karena model ini tidak memperhitungkan level dan peran aktor lain, sehingga mengabaikan manusia sebagai kelompok sasaran. Model implementasi kebijakan ini termasuk dalam model *top-down* yang memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linear, maka penekanannya terpusat pada kepatuhan dan kontrol efektif.

2.1.4. Teori Pemerintahan Daerah

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk pada pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. (Ani Sri Rahayu, 2018: 1-4)

Pada prinsipnya pengertian tentang pemerintahan daerah tersebut tidak jauh berbeda antara pengertian yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan pengertian tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2004, yang pada intinya adalah pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan daerah, diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI, dan yang terakhir berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. Teori Teknologi Informasi

Informasi merupakan hasil pengelolaan data dengan cara tertentu sehingga lebih berarti dan berguna bagi penerimanya. Yang terdapat dalam pengertian sistem informasi, yaitu informasi merupakan pengelolaan menjadi lebih berguna dan berarti oleh penerimanya. (Mc Leod kutipan Yakub dalam Dedy, 2020:12). Sedangkan informasi adalah pengolahan data yang diinterpretasikan maupun di klasifikasi yang dipakai dalam proses untuk mengambil keputusan. (Sutabri dalam Dedy, 2020:12).

Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu ilmu atau studi tentang melakukan proses perancangan, penerapan implementasi, perbaikan dalam pengembangan, mendukung atau manajemen informasi berbasis komputer, yang di khususkan pada perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). TI memanfaatkan komputer sebagai media elektronik dan perangkat lunak yang

terbentuk dari sistem atau aplikasi untuk mengubah, menyimpan, mengelolah, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara *safety*. (Al-Khowarizmi, 2021:1-2).

Sesuai dengan perkembangannya, selain itu TI tentunya bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi lewat elektronik, bahkan merupakan perangkat penting yang harus dimiliki berbagai bidang khususnya dunia bisnis untuk berkoordinasi serta pengarsipan dokumen penting seperti transaksi dan lain sebagainya. Penerapan TI berguna untuk mengelolah informasi yang ada pada masa ini dan merupakan bagian penting untuk meningkatkan kompleksitas dari kerja manajemen akibat dari globalisasi sehingga *response time* diperlukan lebih cepat, serata tekanan akibat dari persaingan bisnis.

TI memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah komputasi yang bersifat logika sehingga mampu membuka kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam melakukan setiap perintah. Jadi dapat dikatakan sebagai alat untuk memecahkan masalah, kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dengan adanya TI membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien bahkan di era sekarang ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Karena TI memberikan solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja maka TI ini kemudian diciptakan dan dikembangkan dari masa ke masa.

Selain itu TI memiliki dampak yang menjadi manfaat dalam aktivitas sehari-hari dan sangat penting. Manfaat bisa sebagai penunjang kehidupan yang

lebih baik dikarenakan ada TI dapat membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat TI pun digolongkan dalam berbagai bidang seperti:

(1) Pendidikan

Dengan adanya TI dibidang pendidikan membuat peserta didik lebih efektif dan aktif dalam proses belajar. Komputer sebagai sarana untuk membuat mudah dalam menciptakan kreativitas peserta didik baik sekolah maupun perguruan tinggi serta menjadikan sumber layanan informasi.

(2) Industri

TI membantu dalam bidang industri dan manufaktur dalam membuat rancangan desain sebuah produk yang akan diproduksi pada industri selain itu dapat mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Hal tersebut dimanfaatkan karena industri membutuhkan pekerjaan yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar.

(3) Bisnis

Dengan TI dalam bidang bisnis maupun perbankan dalam pencatatan transaksi, menyimpan berkas dengan lebih terjamin keamanannya dan sistem perbankan yang lebih maju untuk daya saing. Serta dapat mengontrol pekerjaan dengan mudah cukup dengan teknologi saja.

(4) Militer

Manfaat TI dalam bidang militer bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat dari dalam dan luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi di bidang

militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan tertekan.

(5) Teknik dan Pengetahuan

TI dapat digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angina dan juga cuaca selain itu juga dapat dalam operasian perhitungan. Saat ini semua akses ilmu pengetahuan pun tersedia dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet.

(6) Kesehatan

TI dapat dimanfaatkan sebagai alat mendeteksi serta membentuk dalam diagnosa penyakit serta mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer seperti radiologi, CT Scan ataupun USG. Bahkan teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bidang kesehatan.

(7) Pemerintahan

TI dapat dimanfaatkan dalam bidang pemerintahan dengan diaplikasikan dalam mengelolah data dan informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat dengan mudah diketahui dengan cepat bagi masyarakat yang menggunakan teknologi.

(8) Hiburan dan Permainan

TI dapat digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis dan juga audiovisual supaya lingkup hiburan ataupun games menjadi

lebih baik dan menarik. Bahkan beberapa asosiasi komputer pun sedang merancang games menjadi suatu pekerjaan.

(9) Hukum dan Kriminal

TI dapat membantu bidang hukum dan kriminal untuk membuat mudah aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pidana, perdata, dan lain sebagainya, selain itu dapat dengan mudah terdeteksinya pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan kelas *Cyber Crime* sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi.

2.1.6. Teori E-Kinerja

Penilaian kinerja merupakan penilaian prestasi yang dilakukan secara formal dan sistematis dalam satu periode. Banyak indikator yang dapat mengukur tingkat kinerja pegawai, salah satunya adalah indikator yang dikemukakan oleh Wibowo (2015:4), yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja harus dilakukan secara relevan dan signifikan dengan mengklasifikasikan beberapa indikator untuk menilai kinerja yaitu:

- (1) Produktivitas; artinya berapa banyak output atau hasil kerja yang bisa dihasilkan seorang pegawai selama bekerja.
- (2) Kualitas; artinya seberapa bagus hasil kerja yang telah dilakukan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- (3) Ketepatan waktu; artinya pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tepat waktu.

- (4) Cycle Time; artinya berapa lama bagi seorang pegawai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.

Menurut Mukti (2019:2) E-Kinerja adalah aplikasi buatan yang dikhususkan untuk memantau dan menilai kinerja dari pegawai secara langsung dengan cara memasukkan data kerja harian kedalam software untuk mendapatkan persetujuan dari atasan. Disamping itu menurut Putri (2014:5) E-Kinerja merupakan suatu aplikasi yang berbasis web yang dipergunakan untuk menganalisis jabatan, beban kerja, unit maupun satuan kerja organisasi yang merupakan dasar untuk menghitung prestasi kerja dan pemberian intensif kerja.

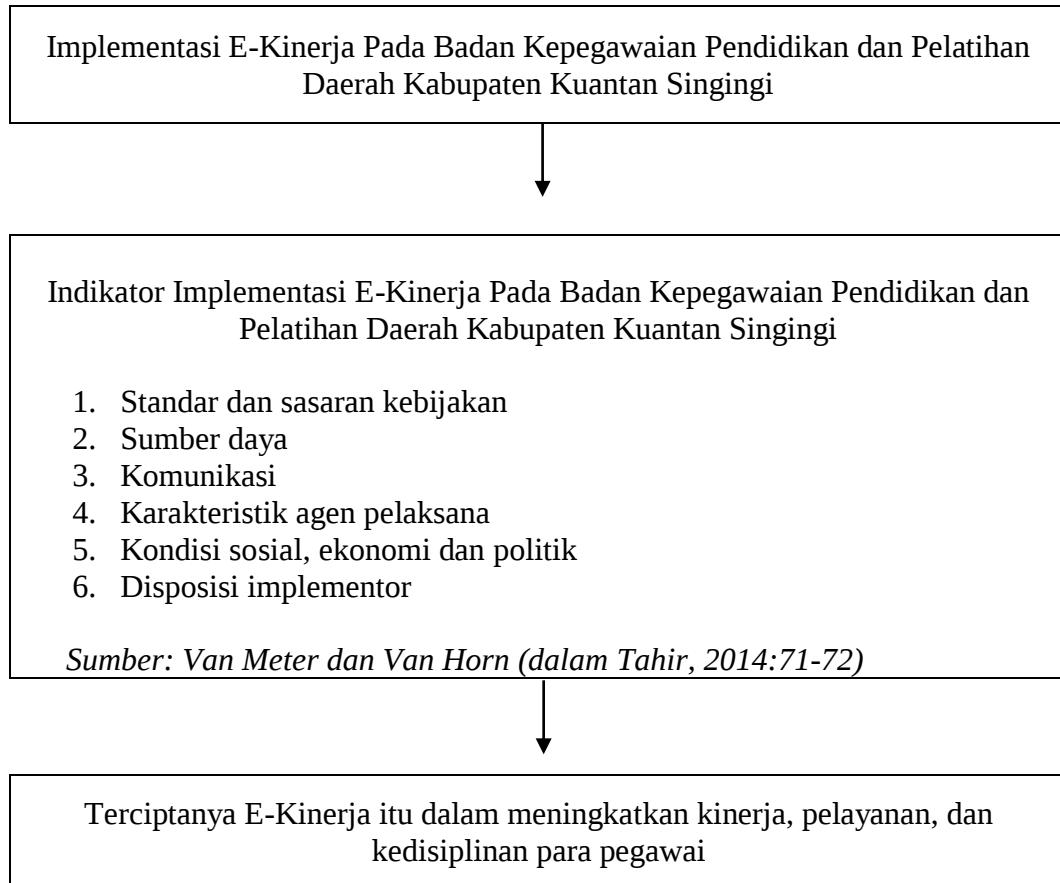
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2019:3) menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2014:5) yang menunjukkan bahwa e-kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dari hasil penelitian yang dilakukan Mukti et al. (2019:5) juga mengatakan bahwa penerapan e-kinerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja.

Dijelaskan didalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan E-Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi bahwa Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut E-Kinerja adalah sistem pengawasan kinerja kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan alur kerja serta menghasilkan informasi yang dapat mengukur besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai atau yang disingkat dengan TPP.

Jadi dapat dipahami bahwa E-Kinerja adalah sistem yang dapat mengatur sumber daya manusia dengan menggunakan internet sehingga kegiatan yang pegawai lakukan dapat dipantau oleh atasan dalam waktu yang singkat. E-Kinerja merupakan aplikasi yang hanya diakses oleh ASN yang mempunyai Nomor Induk Pegawai. E-Kinerja juga merupakan bagian dari adanya reformasi birokrasi dizaman modern yang mampu mengubah kinerja pegawai, sebab dengan adanya E-Kinerja pekerjaan setiap hari yang dulu dilakukan secara manual kini lebih efektif dan efisien bagi pegawai didalam instansi pemerintah.

2.2. Kerangka Pemikiran

II. 1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban atau pendapat. Dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya penggunaan aplikasi E-Kinerja terhadap disiplin kerja ASN sehingga masih adanya ASN yang kurang disiplin dalam melaksanakan kerjanya.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk mengukur terlaksana atau tidaknya penerapan E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang bersumber dari:

2.4.1 Standar dan Sararan Kebijakan

Strandar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisasi. Apabila standard an sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2.4.2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

2.4.3 Komunikasi

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

2.4.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi impkementasi suatu program.

2.4.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2.4.6 Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.5. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi E-Kinerja	Implementasi E-Kinerja pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten kuantan singingi	Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Tujuan E-Kinerja 2. Terukur/jelas 3. Dampak E-Kinerja
		Sumber Daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya anggaran 3. Sumber daya teknologi
		Komunikasi	1. Keberhasilan 2. Koordinasi antar pihak 3. Keterbukaan informasi
		Karakteristik Agen Pelaksana	1. Dukungan 2. Sikap 3. Kompetensi
		Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Pegawai 2. Keuangan 3. Sanksi E-Kinerja
		Disposisi Implementor	1. Respon 2. Kognisi/pemahaman 3. Internalisasi

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif menggunakan analisa dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. (Moleong, 2017:6).

3.2. Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 Informan

No	Unsur Informan	Key Informan	Persentase
1	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	25%
2	Kabid Diklat	1	25%
3	Kabid Pembinaan Aparatur	1	25%
4	Kabid Administrasi	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

3.3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. (V.Wiratna Surjarweni, 2018:3).

3.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018:256).

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. (V. Wiratna Surjarweni, 2018:6).

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi E-Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Komplek Perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan (observasi)

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena tersebut. (Gunawan, 2015:143).

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

3.6.2. Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dekomen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang. (Sugiyono, 2014 : 240).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2020:131).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Data yang diperoleh dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

3.7.1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Yaitu pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang

dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2. Reduksi Data (*data reduction*)

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3. Penyajian Data (*data display*)

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap suatu yang diteliti langsung di lapangan dengan penyusunan pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x														
4	Seminar Proposal											x													
5	Revisi Proposal												x												
6	Pembuatan Skripsi													x	x	x	x								
7	Bimbingan Skripsi																	x	x	x	x	x			
8	Sidang Skripsi																							x	
9	Revisi Skripsi																								x

Sumber: Modifikasi Penelitian

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, karena masih ada sebagian pegawai yang tidak tepat waktu saat mengisi kehadiran dan juga server yang bermasalah sering menghambat aktivitas E-Kinerja.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
2. Memberikan reward kepada pegawai yang selalu mengisi absen secara tepat waktu, sehingga para pegawai termotivasi untuk menjadi pegawai yang patuh terhadap kewajibannya
3. Meningkatkan kualitas server agar proses absensi dapat berjalan dengan baik
4. Pegawai sebaiknya meningkatkan tanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah di tetapkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Rajawali Pers: Depok.
- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Al-Khowarizmi. 2021. *Pengantar Teknologi Informasi (Dalam Perkembangan Data Science)*. Umsu Press: Medan
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. PT Kimshafi Alung Cipta: Bekasi
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hiplunudin Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mukarom Zaenal, Laksana Muhibudin Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rahayu Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*. Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Rahman, Dedy Prehanto. 2020. *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV SAH MEDIA: Makassar
- Wibowo. (2015). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- Ahmad, Lokman Mohd. Tahir, 2014, “*School Operational Funding to Support School Activities*”, *International Journal of Evaluation amd Research In Education (IJERE)*, Vol.3, No. 1, March 2014, pp. 66-78
- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 2(2), 99-107.
- Citra, N. A., Widiyanto, M. K., & Puspaningtyas, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 143-152.
- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). Pengantar ilmu administrasi negara.
- Engkus, H. (2020). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan)*.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- GOSAL, R. P. F. G. (2019). *Analisis Pelayanan Buffetier dalam Melakukan Tugas dan Tanggung Jawab di Citi Cafe Restoran Cititel Hotel Mid Valley Kuala Lumpur Malaysia* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).

- Gulo, T. Y., Simbolon, B. R., & Ndruru, K. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal). *Jurnal Governance Opinion*, 8(2), 132-140.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1(3): 17
- Juni, Z., Muhammad, L., & Al Ashadi, A. (2020). *Analisis Nilai-Nilai Moral Pada Cerita Rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas* (Doctoral dissertation, IKIP PGRI PONTIANAK).
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381-1389.
- Maranda, H. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. April, 12-40
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 81-88.
- Mukti, Dwi Rafita, Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti, and Lilik Farida. (2019). "Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis E-Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi." *EJournal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 6(2):175.
- Muspawi, M., & Claudia, P. R. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar di SMA Swasta Pelita Raya Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 180-192.
- Nasution, M. F. (2022). *Inovasi Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ningsih, H. D. (2023). Pengaruh Gaji, Disiplin Kerja, Motivasi Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja Pada PT. Swissplast. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Nurhayati, Ema. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-Kinerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 2(2):79–91.

- Putri, Komara Eka, Muhammad Arfan, and Hasan Basri. (2014). Pengaruh Penerapan E-Kinerja dan Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3(4):1–10.
- Rahmawati, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinnas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Soppeng* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Sahril, S., Ramdiana, R., & Astuti, Y. (2022). Variasi pukulan didong pada group aliran masa di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 7(1).
- Sahya, A. 2016. Ilmu Administrasi Negara. In *CV. Pustaka Setia* (Vol. 53, Issue 9)
- Siregar, M. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Syahida. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang dalam Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Sosial*, 3 (2)
- Syahnur, I., Tahir, M., & Nasrulhaq, N. (2022). Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 685-698.
- Tasya, R., Purnamasari, Ramdani. (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. 7, 42-47.
- Wahib, A. (2020). Optimalisasi Pencegahan Pencemaran Minyak Dalam Implementasi Annex 1 Marpol 1973/1978 Di Mt. Enduro Pt. Pertamina (Persero). *Karya Tulis*.
- Wahyuni, S. (2020). Pengaruh Penerapan E-Kinerja Dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 153-164.
- Wibowo, Y. S. (2023). *Implementasi Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 (Studi Karaoke Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiah)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Undang-Undang:

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan E-Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi E-Kinerja Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Internet:

“E-Government: Konsep dan Implementasi” 24 Juli 2022.

<https://diskominfo.solokab.go.id>

“Kuansing Rancang E-Kinerja Untuk Tingkatkan Kinerja dan Disiplin ASN”

2021. <https://kuansing.go.id>

Yusuf Abdul Azis. 2022, “Arsip Elektronik: Pengertian, Mengelola, dan Contoh”.

<https://pengadaan.deepublis>